



El-Nino dan Ancaman Api dari konsesi (Peringatan Bagi Negara)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)
2023

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) diprediksi akan memuncak di Agustus dan September. Pada Juni lalu, tercatat sebanyak 7.857 *hotspot* api. Walhi mencatat, sebanyak 2.080 titik api berada di konsesi-konsesi korporasi yang terdiri dari konsesi Hak Guna Usaha (HGU) sawit, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTI). Hotspot di konsesi perusahaan ini berisiko tinggi terhadap kerentanan kebakaran hutan dan lahan.

Beberapa wilayah yang massif terjadi karhutla adalah Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Jambi. Di Riau, kami menemukan titik api di konsesi RAPP sebanyak 7 *hotspot* api dan PT MLP sebanyak 6 *hotspot*. Di Jambi ditemukan 54 *hotspot* hanya di konsesi PT WKS. Di Sumatera Selatan titik api ditemukan di konsesi PT MHP sebanyak 7 *hotspot*. Di Kalimantan Barat ditemukan 9 *hotspot* hanya di konsesi PT NI. Di Kalimantan Tengah ditemukan sebanyak 8 *hotspot* hanya di konsesi milik PT ML.

Kerentanan karhutla ini disebabkan oleh massifnya perizinan di wilayah gambut dan hutan. Sebanyak 969 perusahaan sawit berada di wilayah gambut dan hutan dengan luasan mencapai 5,6 juta hektar. Rinciannya HGU perkebunan kelapa sawit seluas 1.901.713,54 hektar, HTI seluas 2.817.880,72 hektar dan HPH seluas 888.454,07 hektar. Luas izin perkebunan kelapa sawit di ekosistem gambut dapat jauh lebih besar apabila perhitungannya memperhatikan jumlah luasan IUP Kelapa Sawit yang tidak ber-HGU yang tidak terdaftar di Kementerian ATR/BPN.

Alih-alih menangani kerentanan tersebut, dengan tindakan koreksi atas kebijakan pengelolaan sumber-sumber penghidupan saat ini, dengan melakukan evaluasi menyeluruh perizinan serta penegakan hukum, dengan memberikan sanksi kepada

korporasi yang melakukan pelanggaran. Justru pemerintah memberikan pengampunan kepada korporasi yang beraktivitas ilegal dan terlibat karhutla melalui UU Cipta Kerja pasal 110 A dan 110 B.

Seolah tidak ingin menyentuh akar persoalan karhutla, pemerintah lebih memilih melakukan modifikasi cuaca sebagai mitigasi. Konsekuensinya adalah negara harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Khusus Kalimantan Tengah saja, pemerintah menyiapkan 83 miliar untuk cegah karhutla dan modifikasi cuaca. Artinya negara (rakyat juga di dalamnya) harus menanggung biaya mitigasi karhutla dan penanganan saat karhutla terjadi.

Karhutla yang tidak dapat ditangani dengan baik juga berkontribusi besar bagi GRK, sehingga kontradiktif dengan komitmen mitigasi perubahan iklim. Pada 2015, saat karhutla besar terjadi FOLU menjadi emitor terbesar.

Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	<i>Peat Fire</i>	Limbah	Total
	(Gg CO ₂ e)						
2015	536.306	49.297	117.160	742.843	822.736	106.061	2.374.403
2016	538.025	55.307	122.185	417.385	90.267	112.352	1.335.521
2017	562.244	55.395	127.503	476.005	12.512	120.191	1.353.850
2018	595.665	59.262	110.055	602.188	121.322	127.077	1.615.569
2019	638.808	60.175	108.598	468.425	456.427	134.119	1.866.552

Tabel 1. Emitter GRK

Kalimantan Tengah

Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019 menjadi cerita kelam bagi Indonesia. Kejadian kebakaran hutan dan lahan menimbulkan berbagai dampak buruk ke berbagai lini kehidupan seperti masalah kesehatan, menurunnya perekonomian masyarakat, dan lainnya sebagai akibat dari kabut asap yang meliputi Kalimantan Tengah. Tidak hanya itu, Malaysia dan Singapura yang merupakan negara tetangga Indonesia juga merasakan dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia. Dengan kejadian pencemaran asap lintas batas negara lain yang menyebabkan terganggunya lingkungan negara lain dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip hukum internasional khususnya yang mengatur tentang hukum lingkungan internasional.

Berdasarkan hasil data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dikutip pada artikel databoks dengan judul "hutan dan lahan seluas 2,6 juta ha terbakar pada 2015" diketahui bahwa pada tahun 2015 Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan seluas 2,6 juta ha, Provinsi Kalimantan Tengah menduduki posisi kedua sesudah Sumatera Selatan dengan luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 584 ribu hektar.

Selama beberapa bulan ke belakang, dampak dari El Nino ini seperti cuaca yang tidak bisa diprediksi, peningkatan suhu yang tinggi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya pencegahan dini terhadap prediksi kejadian El Nino ini dari berbagai kalangan baik dari pemerintah selaku pemangku kebijakan, perusahaan yang memiliki wilayah lahan dengan tingkat kerentanan tinggi.

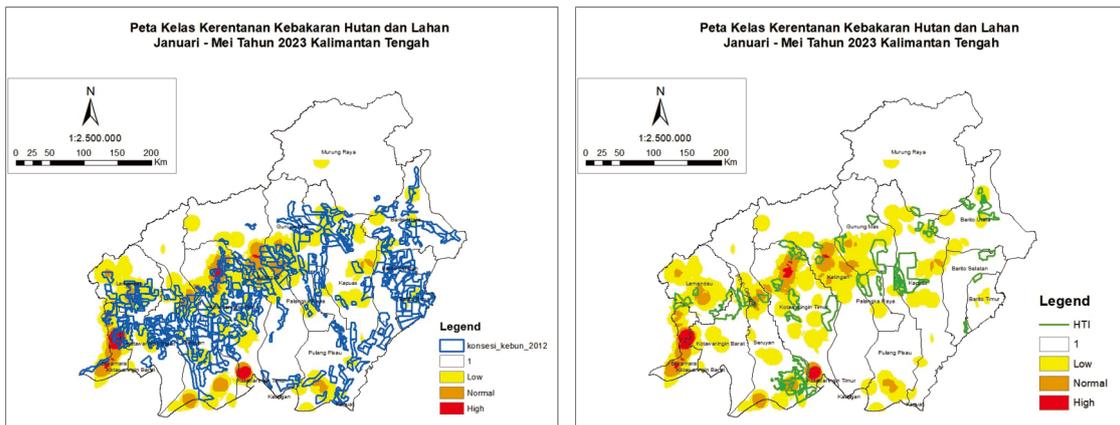
Untuk itu, perlu adanya analisis terkait wilayah mana saja yang merupakan kawasan rentan kebakaran hutan dan lahan yang berdasar dari sebaran citra hotspot api selama periode bulan Januari-Mei tahun 2023, serta risiko kerentanan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hotspot api periode 2015-2022. Selain itu perlu adanya analisis wilayah yang rentan kebakaran hutan dan lahan yang berada di atas konsesi dan gambut, sehingga pihak korporasi dapat melakukan pencegahan dan peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di areal konsesinya.

Berdasarkan kebutuhan data analisis tersebut, Walhi Kalimantan tengah melakukan kajian analisis tersebut untuk menilai risiko bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana kebakaran hutan dan lahan agar kejadian kebakaran hutan dan lahan sebelumnya tidak kembali terjadi di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pantauan citra satelit VIIRS C2 NASA Kerentanan Kebakaran hutan dan lahan Januari–Mei Tahun 2023 di Kalimantan Tengah overlay dengan konsesi perkebunan kelapa sawit dan IUPHHK-HT (Izin Usaha Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman), Analisa data ini menggambarkan tingkat kerentanan kebakaran hutan dan lahan di sebagian tempat. Kelas Kerentanan terbagi menjadi 3 yaitu high (tinggi), normal (sedang), dan low (rendah) dengan metode pengumpulan jumlah hotspot api Januari-Mei di Kalimantan Tengah.

Berdasarkan pantauan bahwa daerah yang mengalami kerentanan tinggi yang berwarna merah berlokasi di daerah Kabupaten Sukamara dan Kotawaringin Timur. Ada terdapat 10 perusahaan yang konsesinya berisiko tinggi atau *high risk* terhadap kerentanan kebakaran hutan dan lahan berdasarkan hotspot api per Januari-Mei tahun 2023. Dari 10 Perusahaan di antaranya ada 8 perusahaan yang merupakan perkebunan kelapa sawit, dan 2 perusahaan di antaranya IUPHHK-HT. Dengan lokasi yang paling banyak ditemukan di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Sukamara. Dari 10 korporasi yang sudah beroperasi sebanyak 8 buah, 2 korporasi diduga masih belum operasional dan belum ada pembukaan lahan berdasarkan data Dinas Perkebunan tahun 2021 dan Dinas Kehutanan 2022.

Secara umum Kalimantan Tengah merupakan kawasan yang cukup rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Berikut adalah peta kerentanan kebakaran hutan dan lahan yang overlay dengan konsesi di Kalimantan Tengah. Sepanjang bulan Januari-Mei juga ditemukan hotspot sebanyak 517 titik di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah, di antaranya 7 titik berpotensi menjadi titik kebakaran yaitu berada di Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan dan Katingan. Dari hasil analisis pada tabel pemantauan hotspot api sepanjang bulan Januari-Mei tahun 2023 wilayah Kabupaten Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat bahwa titik api yang paling banyak ada di wilayah Kotawaringin Timur sebanyak 97 titik, Katingan 82 titik, Sukamara 77 titik, Seruyan 65 titik.



Gambar 1. Peta Kelas Kerentanan Karhutla Periode Januari-Mei Tahun 2023 di Kalimantan Tengah Overlay dengan konsesi perkebunan dan HTI

Jambi

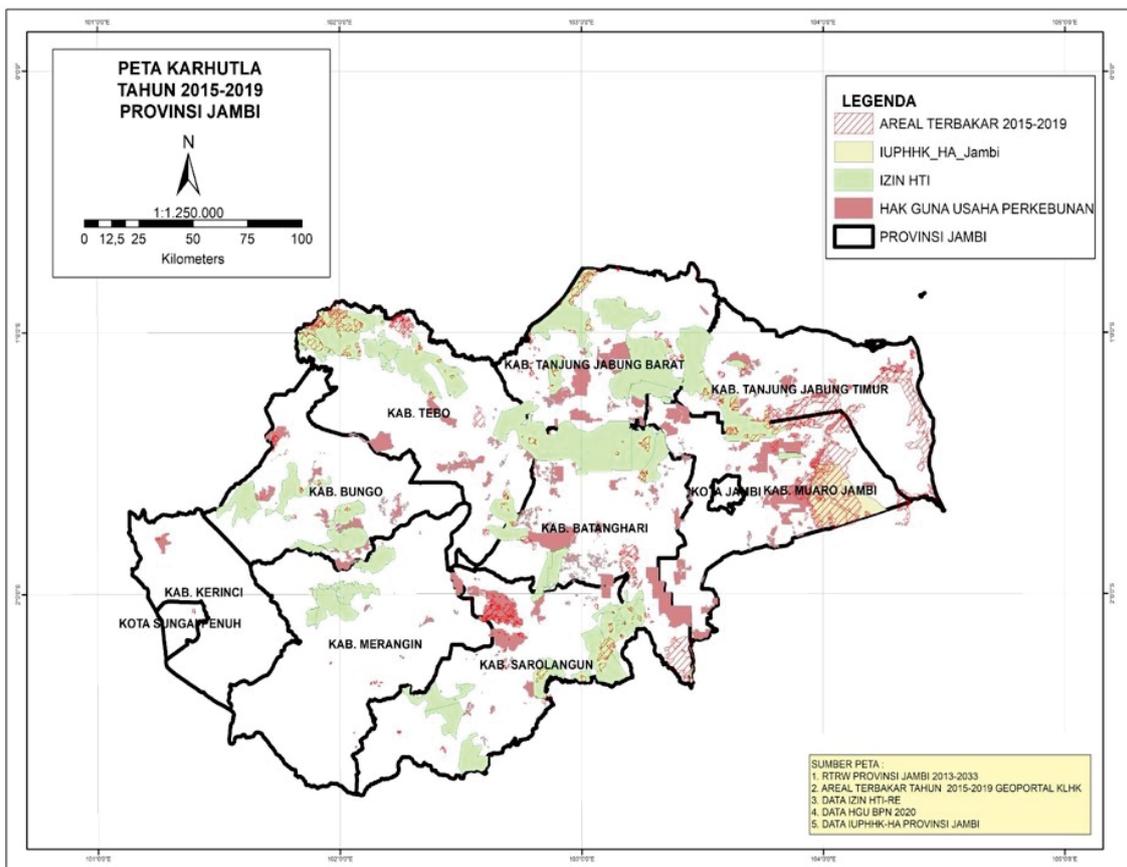
Tahun 2015-2019 menjadi catatan kelam bagi Provinsi Jambi di mana dalam rentang tahun tersebut terjadi kebakaran seluas 238.401,3 hektar. Dari luasan tersebut 67% (158.971 Hektar) areal terbakar berada pada areal tanah Gambut dan sisanya 33% (79.430,3 Hektar) pada areal Tanah Mineral. Kebakaran pada tahun 2015 dan 2019 tidak hanya berakibat kepada terjadinya kerusakan lingkungan, rakyat Jambi juga merupakan korban dari kebakaran hutan dengan 63.554 kasus penyakit ISPA.

Berdasarkan hasil analisis Walhi Jambi peristiwa kebakaran pada Areal Gambut merupakan dampak dari banyaknya perizinan perusahaan di sektor kehutanan dan perkebunan yang diberikan, aktivitas pengeringan gambut/kanalisasi yang dilakukan oleh perusahaan serta lemahnya pengawasan kebakaran oleh perusahaan menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan.

Dari pemantauan dan analisis spasial yang dilakukan oleh Walhi Jambi menggunakan data kebakaran tahun 2015-2019 yang dikeluarkan oleh KLHK serta data Perusahaan (HA, HTI dan Perkebunan kelapa Sawit) diketahui bahwa pada kebakaran hutan dan lahan terjadi seluas 104.495,1 hektar atau 43,8% dari total kebakaran hutan dan lahan :

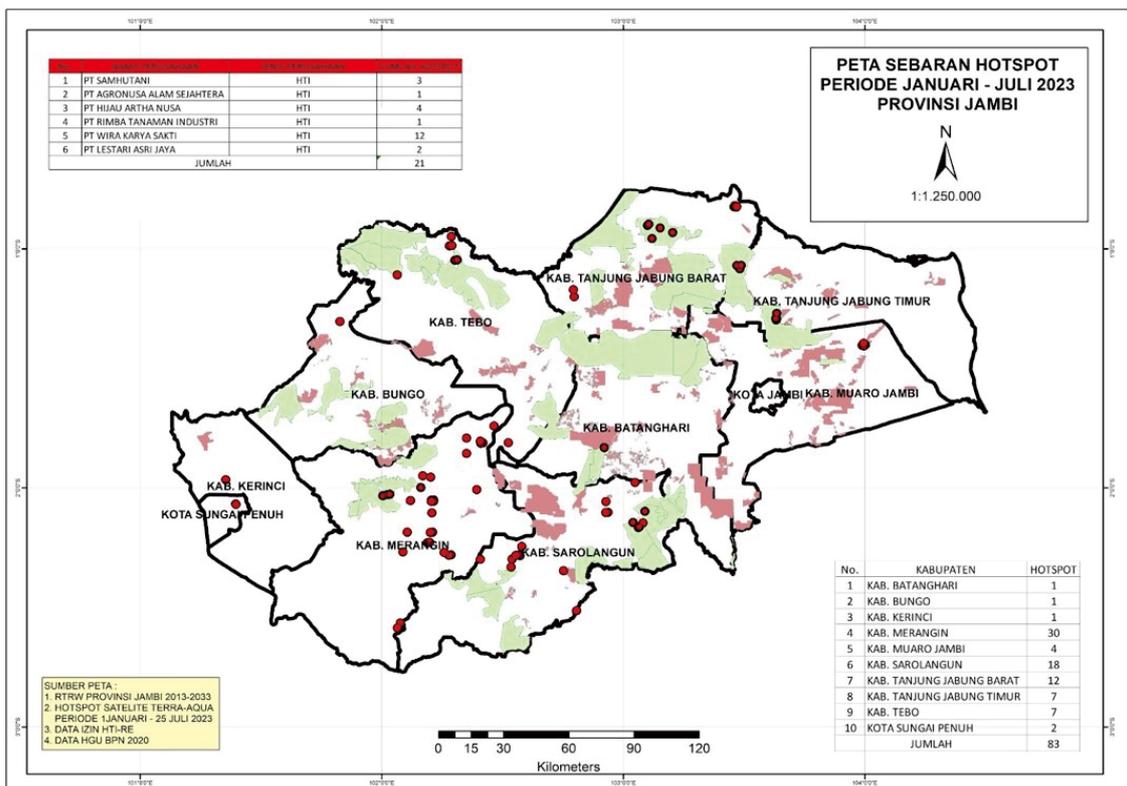
No.	Perusahaan	Luas
1	HTI DAN RE	41.583,59
2	HA	43.256
3	HGU	19.655,21
Total		104.495,1

Tabel 2. Kebakaran pada izin perusahaan



Gambar 2. Peta Karhutla Tahun 2015-2019 Provinsi JAMBI

Pada tahun 2023 Periode 1 Januari–25 Juli 2023 Walhi Jambi menganalisa hotspot yang terjadi di Provinsi Jambi menggunakan satelite Terra-Aqua (MODIS). Dari hasil analisis diketahui bahwa pada pada Provinsi Jambi terdapat 83 hotspot di mana terdapat 21 hotspot berada dalam izin perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya keseriusan perusahaan dalam mengamankan wilayah izinnya dari bahaya bencana Kebakaran hutan dan lahan.

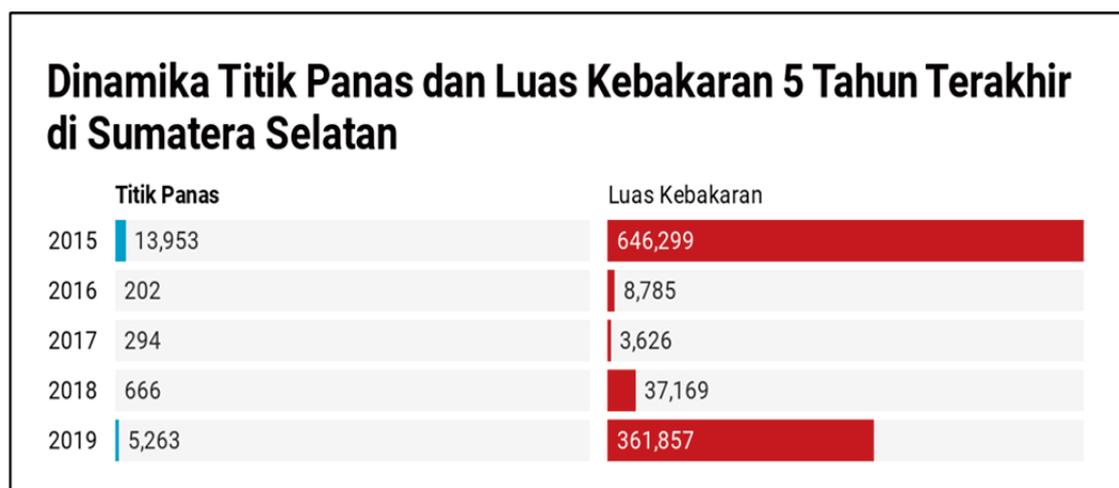


Gambar 3. Peta Sebaran Hotspot Periode 1 Januari–25 Juli 2023

Sumatera Selatan

Bencana Ekologis kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang merampas hak masyarakat Sumatera Selatan atas udara yang baik dan sehat sehingga rumah sakit dipenuhi oleh penderita penyakit ISPA sebanyak 291,807 jiwa pada tahun 2019. Luas lahan Gambut di Sumsel sekitar 1,2 Juta sekitar 15% dari luasan Sumsel seluas 8,3 Juta ha. Pemberian izin di lahan gambut untuk konsesi 135 IUP Kebun kayu (HTI) dan perkebunan kelapa sawit dengan luasan 746.000 ha yang berada di gambut Lindung. Izin-izin tersebut terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan gambut yang terus berulang. Sepanjang tahun 2015-2019 kebakaran kawasan hutan dan lahan terjadi di Sumatera Selatan, hal ini disebabkan kondisi lahan gambut yang telah rusak oleh pembuatan kanal perusahaan, sehingga sulit dipadamkan jika terbakar. Izin yang diberikan pemerintah menyebabkan gambut rusak dan rentan terbakar saat memasuki musim kemarau.

Perkembangan hotspot dan luas kebakaran pada tahun 2015-2019 di Sumatera Selatan, kembali memuncak pada tahun 2019 terdapat 5,263 *fire hotspot* dengan kebakaran Kawasan hutan dan lahan luas 361,857 ha, Kebakaran hutan dan lahan ini adalah lokasi yang sama dan berulang setiap tahunnya.



Gambar 4. Dinamika Titik Panas dan Luas Kebakaran 5 Tahun Terakhir di Sumatera Selatan

Sejak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut 2015 hingga 2019 perusahaan HTI PT Bumi Mekar Hijau, PT Waringin Agro Jaya, PT Rambang Agro Jaya, dan PT Waimusi Agro Indah belum ada satu pun perusahaan yang diberi sanksi pencabutan izin oleh Pemerintah. Padahal putusan pengadilan yang menyatakan perusahaan bersalah telah inkraht atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.

Lemahnya pengawasan upaya restorasi ekosistem gambut, khususnya pada izin perusahaan mengakibatkan penanganan karhutla tidak mengalami kemajuan, bahkan semakin memburuk yang terjadi di Sumatera Selatan. Jika mempertimbangkan peningkatan data hotspot saat ini. Berbanding terbalik dengan tudingan banyak pihak dari pemerintah, upaya restorasi (infrastruktur, pembasahan ekosistem gambut, dan upaya vegetasi kembali) ditemukan di lapangan justru lebih konsisten dilakukan oleh masyarakat. Pada sisi keterbukaan informasi, publik tidak pernah disajikan aksesibilitas terhadap dokumen-dokumen pemegang konsesi, khususnya dalam upaya melakukan restorasi.

Pada tahun 2021 Walhi Sumatera Selatan melakukan monitoring implementasi komitmen restorasi gambut yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan pada 6 konsesi perusahaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (PT Waringin Agro Jaya (WAJ), PT Gading Cempaka Graha (GAG), PT Sampoerna Agro Tbk (SA), PT Kelantan Sakti (KS), PT Rambang Agro Jaya (RAJ), dan PT Tempirai Palm Resources (TPR). Restorasi yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan maka perusahaan harus menjaga tinggi muka air tidak lebih dari 40 cm sehingga KLHK memerintahkan untuk membuat sekat-sekat kanal. Dari 6 perusahaan yang dilakukan monitoring implementasi komitmen restorasi gambut sebagai berikut:

1. Tidak ada bangunan sekat kanal yang dibangun PT WAJ di 15 titik sampel yang di monitoring.
2. PT GCG dari 5 titik sampel monitoring hanya ada 2 sekat kanal yang dibangun itu pun dalam kondisi buruk.
3. PT SA dari 7 titik sampel monitoring tidak ada sekat kanal yang ditemukan/dibangun.
4. PT KS dari 4 titik sampel monitoring tidak ada sekat kanal yang ditemukan/dibangun.
5. PTRAJ dari 4 titik sampel monitoring hanya ada 2 sekat kanal yang dibangun.
6. PT TPR dari 9 titik sampel monitoring tidak ada sekat kanal yang ditemukan/dibangun.

Dari hasil monitoring yang dilakukan dan dianalisis bahwa kebakaran hutan dan lahan di konsesi 6 (enam) perusahaan ini, penegakan hukum terhadap kasus karhutla masih sangatlah lemah. Serta pemantauan dan pelaksanaan implementasi di konsesi-konsesi ini tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Banyaknya fasilitas yang tidak memadai dan tidak ditemukannya aktivitas restorasi menunjukkan bahwa tidak adanya tanggungjawab pemegang konsesi terhadap wilayah mereka yang harus dilakukan restorasi.

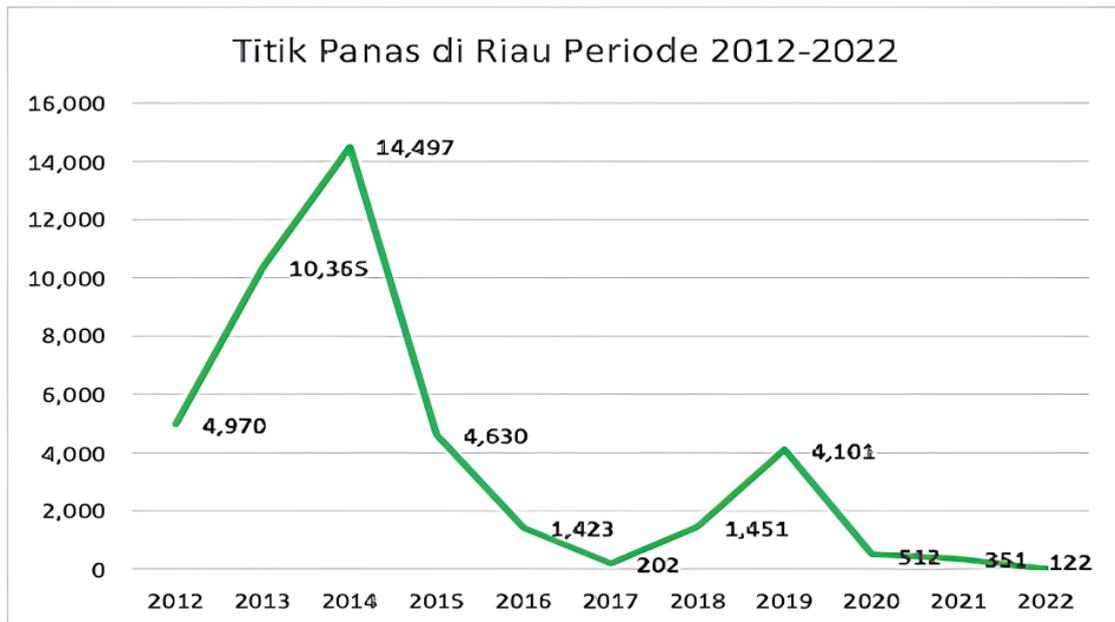
Riau

Persoalan karhutla merupakan persoalan krusial di Provinsi Riau. Peristiwa ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan ekosistem, lebih jauh polusi asap yang juga berimbas buruk pada kesehatan manusia. Walhi Riau mencatat peristiwa karhutla dahsyat di Riau telah terjadi sejak 1970-an. Peristiwa ini berelasi erat dengan kebijakan investasi pembukaan hutan alam Riau untuk industri perkebunan (HPH). Hanya saja dalam periode tersebut, karhutla dan polusi asap yang diakibatkannya belum terjadi secara periodik. Hal ini karena peristiwa karhutla tidak berelasi langsung aktivitas pembukaan dan penyediaan lahan. Penyebab kebakaran adalah perubahan struktur vegetasi akibat pembalakan kayu.

Karhutla dan dampak buruk polusi asap di Riau mulai terjadi secara periodik tahun per tahun sejak 1997. Walau pun sejak 2020, peristiwanya tidak lagi mengakibatkan polusi asap signifikan. Kondisi iklim dan strategi penanggulangannya menggunakan pendekatan modifikasi cuaca terbukti ampuh mengatasi api dengan cepat dan meredam asap dari ekosistem gambut. Secara kemanusiaan, pendekatan modifikasi cuaca merupakan pilihan yang tepat untuk mencegah masyarakat terpapar dari dampak buruk polusi asap. Hanya saja terdapat kritik terhadap penggunaan langkah tersebut. Pertama, sumber dana yang

dipergunakan masih bersumber dari anggaran negara, tidak dibebankan kepada korporasi. Kedua, modifikasi cuaca tidak mampu memulihkan ekosistem gambut dan ekosistem lain yang telah dirusak aktivitas ekstraktif perizinan perkebunan dan kehutanan. Contoh konkretnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau mencatat luas karhutla selama 2022 di Riau mencapai 1.219 hektare. Karhutla terjadi baik lahan gambut maupun tanah mineral.

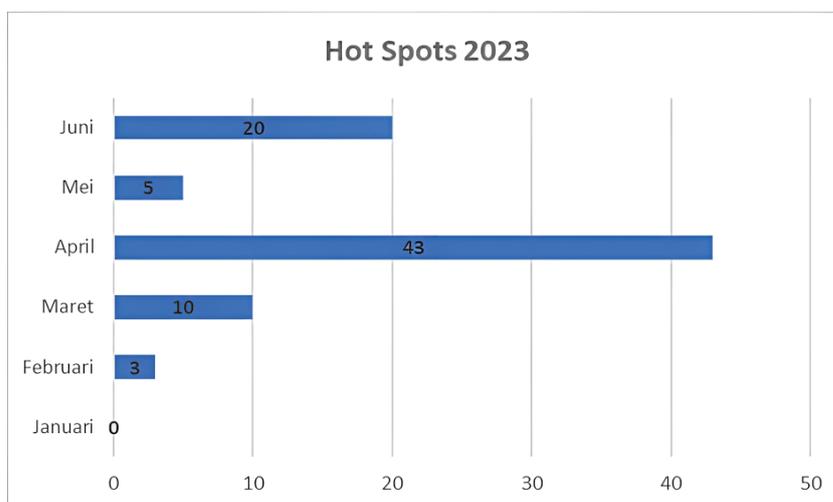
Penurunan sebaran titik panas di Riau dapat dilihat dari grafik di bawah.



Sumber: Satelit NASA Confidence >70%

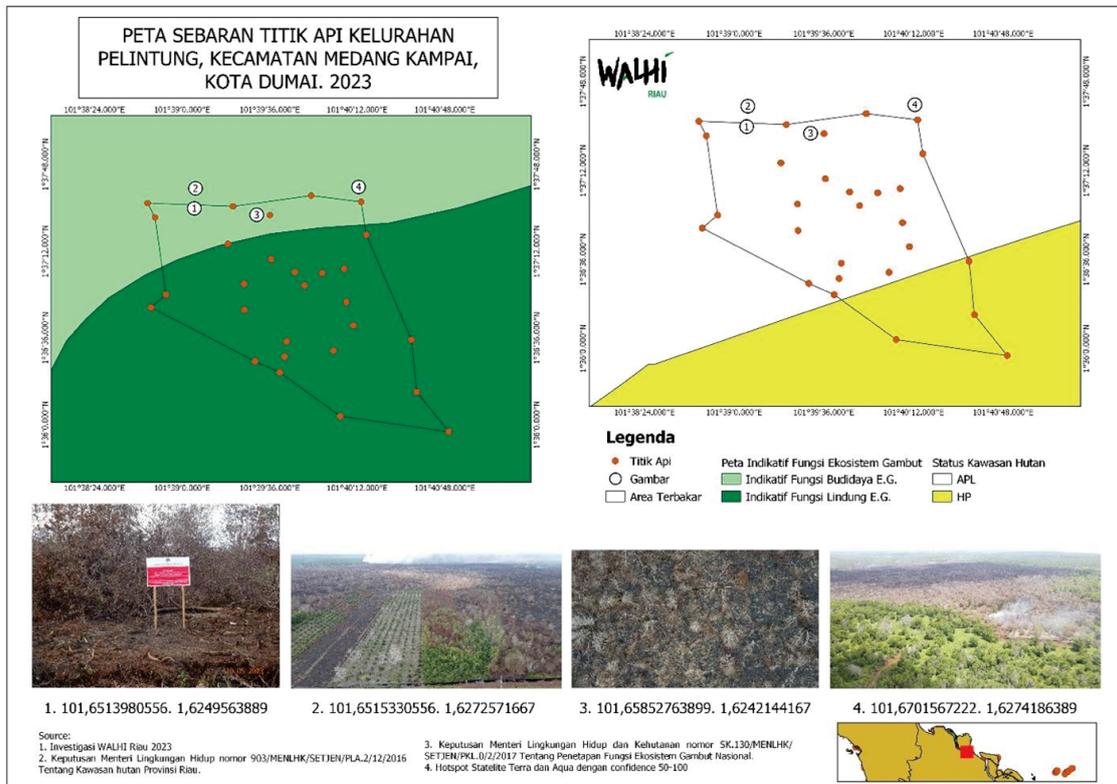
Grafik 1. Titik Panas di Riau Periode 2012-2022

Tantangan sesungguhnya terhadap pilihan penanggulangan karhutla dan dampak buruk polusi asap akan terjadi pada tahun ini. Prediksi BMKG menyebut puncak kemarau tahun ini akan terjadi pada Agustus 2023. Sebelum kejadian ini, Walhi Riau memantau temuan titik panas dan kebakaran sepanjang 2023. Jumlah temuan ini memperlihatkan peningkatan titik api signifikan dalam tujuh bulan ini.



Grafik 2. Titik Panas di Riau Tahun 2023

Walhi Riau juga melakukan pemantauan pada Mei 2023. Hasil pemantauan ini menemukan titik api di areal kerja perusahaan yang diindikasikan tidak mempunyai kelengkapan dokumen perizinan berusaha. Berdasarkan informasi dari masyarakat, titik panas tersebut berada di areal perkebunan kelapa sawit yang diduga milik PT Mutiara Naga Indonesia, Kota Dumai, Riau.



Gambar 5. Peta Sebaran Titik Api Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai 2023

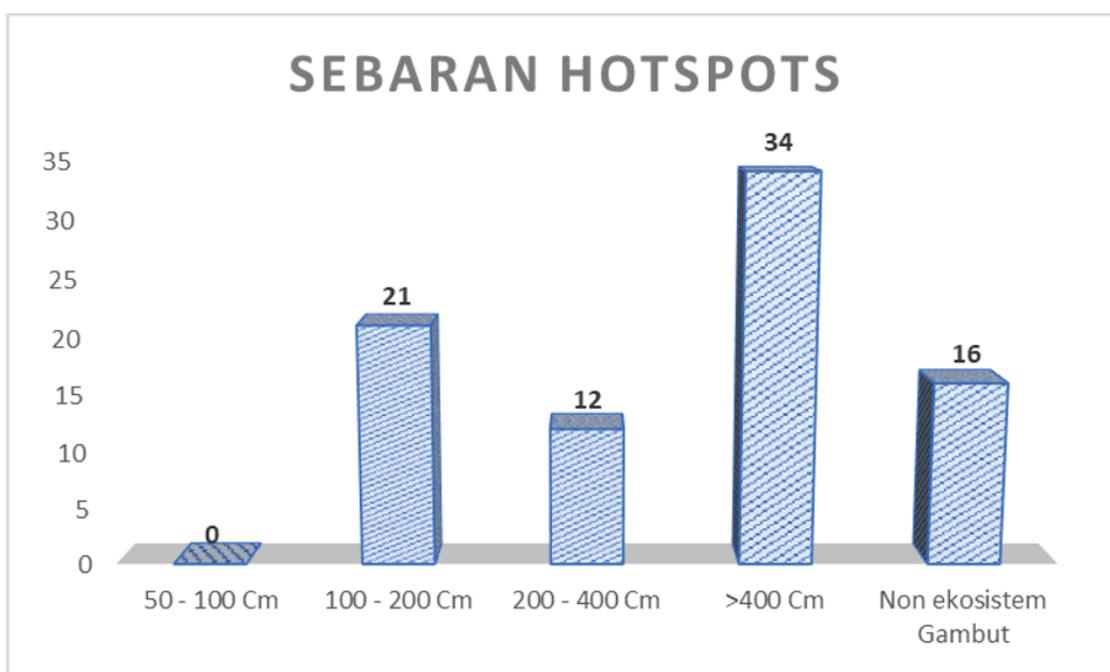
Analisis dengan pendekatan *Remote Sensing* dan pemeriksaan lapangan menunjukkan lokasi kebakaran berada di Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai, Koordinat N 1°37'32.45" E 101°39'6.56" N 1°37'31.41" E 101°39'6.07". Areal yang diduga milik PT Mutiara Naga Indonesia dengan kedalaman gambut lebih dari 4 meter. Areal terbakar lebih kurang 600 ha terdapat tanaman sawit dan belukar.

Proses penegakan hukum terhadap peristiwa karhutla di Riau juga belum maksimal. Informasi yang diperoleh Walhi Riau, hingga Juni 2023, Polda Riau mengungkap 14 kasus kebakaran hutan dengan luas 830,5 ha dan lahan dengan 15 tersangka perorangan tanpa satupun korporasi. Selain pantauan di areal kerja PT Mutiara Naga Indonesia, analisis spasial Walhi Riau juga mengindikasikan terdapat titik panas di 10 areal kerja perusahaan lainnya.

Tantangan lain mengantisipasi *el nino* di Riau pada tahun ini juga terkait mengantisipasi karhutla di ekosistem gambut. Data hotspot hingga Juli di Riau memperlihatkan mayoritas titik panas berada di ekosistem gambut. Kerentanan karhutla dan polusi asap akan semakin besar dengan memperhatikan data lain yang menunjukkan ekosistem gambut di Riau lebih dari 50%-nya telah dialihfungsikan menjadi lokasi industri monokultur, yang sebagian besarnya dikapling atas nama korporasi.

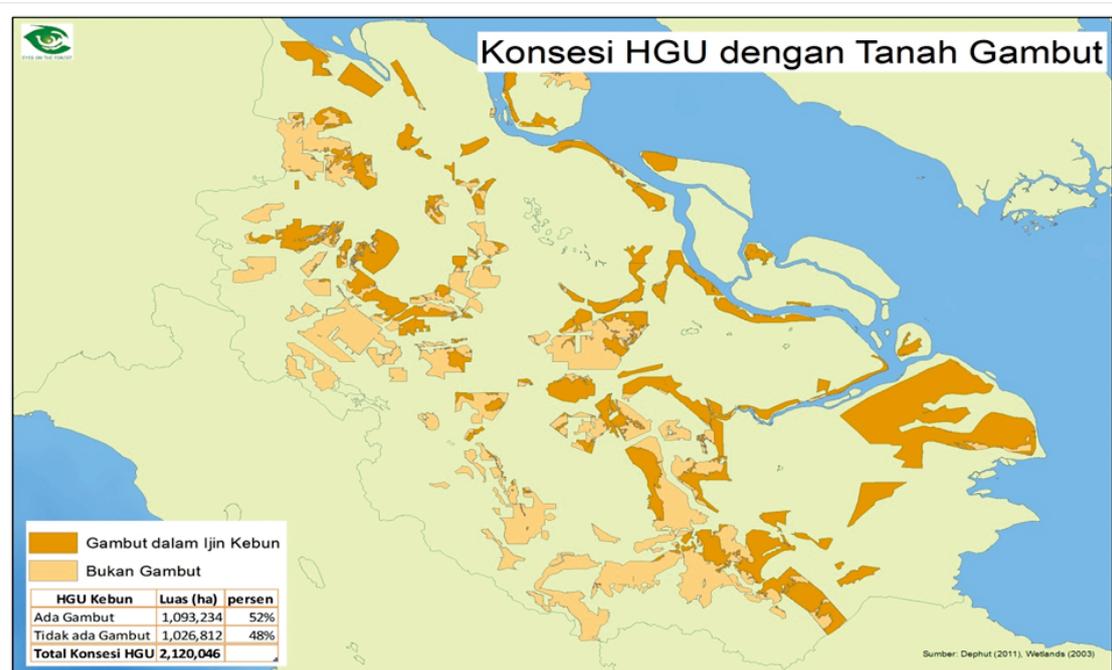
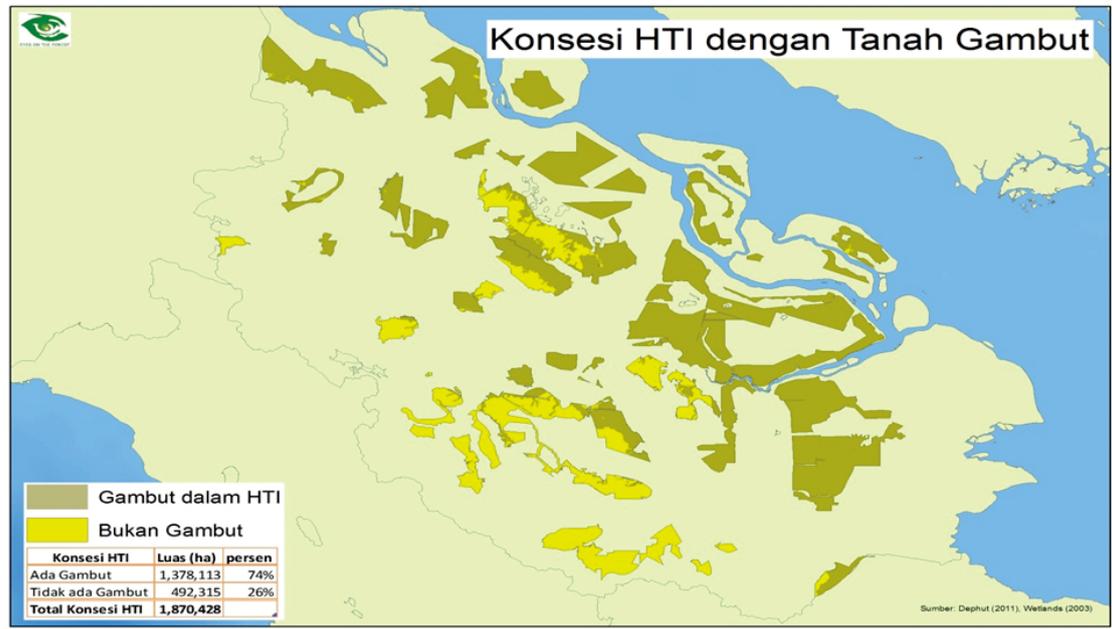
NO	Kepemilikan	Legalitas	HTI/HGU	Kab/Kota	Jumlah Hotspot
1	PT Diamond Raya Timber	443/Kpts-II/1998	HA	Rohil-Dumai	3
2	PT Rimba Rokan Perkasa	554/Menhut-II/2006	HTI	Siak	3
3	PT Riau Andalan Pulp & Paper	327/Menhut-II/2009	HTI	Pelalawan-Siak	3
4	CV Alam Lestari	522.21/IUPHHKHT/I/2003/015	HTI	Pelalawan	1
5	PT Rimba Mutiara Permai	65/Menhut-II/2007	HTI	Pelalawan	1
6	PT Sumatera Riang Lestari	208/Menhut-II/2007	HTI	Kepulauan Meranti	1
7	PT Sumatera Riang Lestari	208/Menhut-II/2007	HTI	Benkalis	1
8	PT Kuartet Putra Melayu	522.1/DISHUT/23.01	HTI	Kampar	1
9	PT Sumber Maswana Lestari	18 Tahun 2003	HTI	Indragiri Hulu	1
10	PT Riau Sakti United Plantation	10/HGU/1987	HGU	Indragiri Hilir	2

Tabel 3. Korporasi yang Menguasai Industri Monokultur



Grafik 3. Sebaran Hotspot di Ekosistem Gambut di Riau

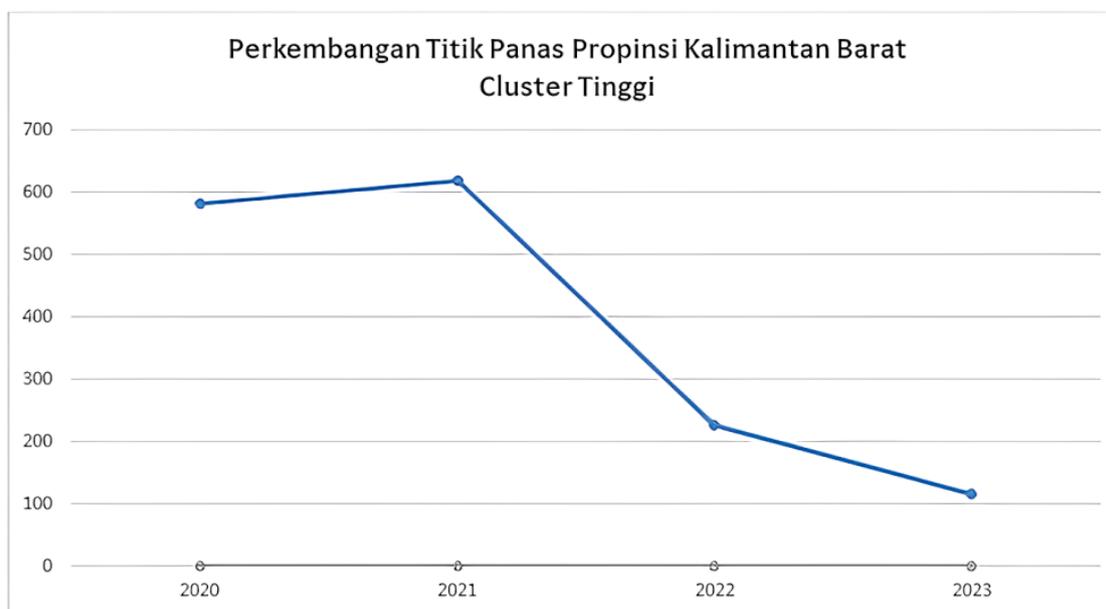
Kerentanan karhutla dan polusi asap di Riau semakin besar dengan memperhatikan fakta mayoritas ekosistem gambut di Riau telah dialihfungsikan dan dibebani perizinan berusaha industri monokultur. Dari sekitar 60% ekosistem gambut yang telah dialihfungsikan, paling tidak 46,15% dibebani perizinan berusaha HTI dan perkebunan kelapa sawit.



Gambar 6. Konsesi HTI dan HGU dengan Tanah Gambut

Kalimantan Barat

Wilayah Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang massif terjadi karhutla. Selama empat tahun terakhir (2020-2023) ratusan titik api masih ditemukan.



Grafik 4. Perkembangan Titik Panas di Provinsi Kalimantan Barat

Karhutla hebat yang terjadi pada 2015 dan 2019 faktanya tidak membuat pemerintah melakukan koreksi terhadap kebijakan tata Kelola hutan dan lahan, secara khususnya perizinan ekstraktif. Bahkan, restorasi gambut yang menjadi program unggulan pemerintah, terbukti tidak memberikan hasil maksimal, jika tidak ingin disebut gagal dalam hal perlindungan dan pulihan ekosistem gambut.

Walhi Kalimantan Barat telah melakukan analisis dan pantauan lapangan terhadap implementasi restorasi gambut yang dilakukan oleh pemerintah. Analisis dan pantauan yang dilakukan terhadap 8 Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang mana di dalamnya sebagian besar wilayahnya masih berstatus konsesi 8 perusahaan perkebunan sawit dan 4 perusahaan Hutan Tanaman Industri. 1 dari 8 perusahaan perkebunan tersebut merupakan anggota Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). 2 dari 8 KHG adalah wilayah target restorasi pemerintah tahun 2017-2020, sementara sisanya adalah kawasan eks kebakaran 2015-2016 non kawasan target restorasi negara.

Arahan restorasi pemerintah kepada PT MPK, GYP, dan SKM sebagaimana yang tertulis dalam dokumen Rencana Restorasi Gambut (RRG) Provinsi Kalimantan Barat 2017-2020 Rencana Tindakan Restorasi pada KHG Sungai Pawan-Sungai Tolak tidak dijalankan secara serius oleh para pemiliknya. Walhi Kalimantan Barat menemukan fakta PT GYP belum menjalankan perintah penanaman kembali di areal bekas kebakaran 2015-2016 seluas 0,16 hektar di mana ditemukan fakta tentang lokasi bekas kebakaran tidak ditanami apa pun, kecuali mendirikan pos jaga dan menara pantau. Perusahaan tersebut juga lalai melindungi tutupan hutan di areal gambut lindung dan dalam terbukti dengan hilangnya tutupan hutan di 18 titik akibat kebakaran hutan.

PT MPK belum menjalankan arahan pembuatan 85 sekat kanal sekunder dan tersier di ruas kanal sepanjang 17.007,82 meter dan juga pembuatan 4 unit sekat kanal sekunder dan tersier di ruas kanal sepanjang 7.121,28 meter. Demikian pula dengan PT SKM juga mengabaikan pembangunan 16 unit sumur bor dan juga lamban dalam menjalankan arahan pembuatan 10 unit sekat kanal di ruas kanal sepanjang 1.800,20 meter dan 1 unit sepanjang 52,03 meter.

Arahan restorasi pemerintah kepada PT MP yang beroperasi di KHG Sungai Durian-Sungai Kualan juga belum dijalankan. WKB tidak menemukan perusahaan pemegang IUPHHK itu telah membangun 46 unit sumur bor; Pembuatan Sekat Kanal Sekunder dan Tersier sebanyak 18 unit pada ruas kanal sepanjang 2.334,56 meter; dan revegetasi melalui pengayaan vegetasi seluas 231,08 ha dan suksesi alami seluas 163,66 ha. Sebaliknya Walhi Kalimantan Barat justru menemukan fakta yang bertolak belakang dengan arahan tersebut, seperti: Tree Cover Loss di 11 titik, pembangunan kanal baru selebar 10 meter dengan kedalaman 3 meter di sepanjang 11 titik TCL titik tersebut; tunggul kayu tebangan serta bekas jalan pengangkutan kayu; dan temuan lokasi penampungan kayu (log pond) tak jauh dari kanal tersebut.

Di luar area target restorasi pemerintah, Walhi Kalimantan Barat menemukan fakta lapangan yang cukup mengejutkan di mana 99 titik areal budidaya dan 167 titik areal gambut lindung yang terbakar pada 2015-2016 hingga kini belum juga direstorasi oleh para pemilik konsesinya. Detail jumlah titik BA dan TCL eks kebakaran 2016-2016 di luar area target restorasi Kabupaten Ketapang yang tidak juga direstorasi oleh para pemilik konsesi. Dan celakanya pemerintah daerah dan pusat pun tidak terlihat akan mengambillih proyek restorasi di kawasan tersebut tanpa alasan yang jelas. Kuat dugaan pembiaran kawasan eks kebakaran 2015-2016 ini adalah karena tidak masuk dalam kawasan target restorasi 207-2020. Fakta-fakta tersebut mengungkapkan bahwa kerentanan wilayah dari karhutla tidak didukung oleh kemampuan pemerintah untuk mengatasi kerentanan tersebut.

Tim Penyusun :

Uli Arta Siagian (Eksekutif Nasional Walhi)

Boy Even Sembiring (Eksekutif Daerah Walhi Riau)

Ginda Bahari (Eksekutif Daerah Walhi Jambi)

Febrian Parah Sopah (Eksekutif Daerah Walhi Sumatera Selatan)

Nikodemus Alle (Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Barat)

Janang Firman Palanungki (Eksekutif Daerah Walhi Kalimantan Tengah)